



# Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018

**Achmad Andrian<sup>1\*</sup>, Sri Budi Eko Wardani<sup>1</sup>**

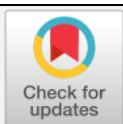
<sup>1</sup>Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok Indonesia

\*Korespondensi: [ach.andrian007@gmail.com](mailto:ach.andrian007@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

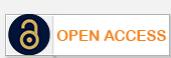
### Info Publikasi:

*Research Article*



### Tanggal Terbit:

30 September, 2021



### Artikel dengan akses terbuka.

**Hak Cipta© 2021** dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh *Journal of Politics and Democracy*

**Lisensi:** *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

### Cantuman Sitasi:

Andrian, A., & Wardani, S. B. E. (2021). Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 28-45. <https://doi.org/10.61183/polik>

## ABSTRAK

Kajian peran modal politik dan modal sosial pencalonan bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati melalui jalur perseorangan pada kontestasi pilkada kabupaten Garut tahun 2018 bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisa terhadap peran kepemilikan modal politik dan modal sosial serta relasi kedua modal tersebut dalam upaya bakal pasangan calon dalam memenuhi syarat minimum dukungan pada tahapan pencalonan jalur perseorangan di pilkada kabupaten Garut tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi lapangan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan peran modal politik berupa pengalaman organisasi keagamaan dan politisi, adanya dukungan elit politik lokal yaitu tokoh agama dan tim sukses yang telah lama terbentuk dan solid, diakumulasi dengan kepemilikan modal sosial berupa kepercayaan masyarakat Garut, relasi sosial melalui interaksi sosial dengan masyarakat Garut serta jaringan sosial yang mendukung pencalonan menjadikan kekuatan bagi bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimum dukungan pada tahapan pencalonan jalur perseorangan di pilkada kabupaten Garut tahun 2018.

*The study on the role of political and social capital in the candidacy of Suryana and Wiwin Suwindaryati through the independent route in the 2018 Garut Regency local election (Pilkada) aims to provide an overview and analysis of how these two forms of capital contributed to the candidates' efforts to meet the minimum support requirements in the independent*

rasi.v1i1.3

*candidacy stage. This research adopts a qualitative approach with a descriptive method, conducted through field studies involving interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that political capital, manifested in the candidates' experience within religious and political organizations, as well as the support of local political elites, including religious leaders and a long-established, cohesive campaign team, played a pivotal role. When combined with social capital, reflected in the trust of Garut's community, social relations through continuous interaction, and supportive social networks, these assets collectively strengthened Suryana and Wiwin Suwindaryati's position in fulfilling the minimum endorsement requirements for their independent candidacy in the 2018 Garut Regency election.*

**Kata Kunci:** Calon Perseorangan; Modal Politik; Modal Sosial; Syarat Minimum Dukungan;

## 1. Pendahuluan

Perubahan politik elektoral yang sebelumnya otoritarian menuju kearah demokratisasi terjadi pasca reformasi di Indonesia ([Perludem, 2011](#)). Salah satu wujud perubahannya ialah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dengan perubahan mekanisme pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 mengenai judicial review UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah melahirkan wajah baru dalam kontestasi pilkada di Indonesia khususnya terkait pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah agar lebih demokratis. Warga negara di tingkat lokal diberikan alternatif pilihan dalam memilih calon kepala daerah yang akan menjadi pemimpin di daerahnya. Kepesertaan pilkada tidak hanya diikuti oleh calon kepala daerah dari partai politik saja, tetapi juga diikuti oleh calon dari jalur perseorangan. Keberadaan calon dari jalur perseorangan mampu memberikan varian pilihan bagi pemilih. Sekaligus menjadi instrumen bagi individu yang memiliki kapabilitas, elektabilitas dan kompetensi yang mumpuni tetapi bukan anggota partai politik "Mereka bisa ikut serta dalam bursa pilkada" ([Anggraini, 2017](#)).

Namun kendati pencalonan pasangan calon perseorangan dalam politik elektoral memperkuat demokrasi. Pengalaman penyelenggaraan pilkada selama ini menunjukkan dinamika politik yang berkembang malah sebaliknya, pencalonan pasangan calon jalur perseorangan selama kontestasi elektoral menunjukkan pola ke arah penurunan, hal tersebut terlihat dari eksistensi pasangan calon perseorangan yang selalu lemah. Merujuk pada penelitian Rumayya ([2016](#)), persentase awal pasangan calon jalur perseorangan yang maju dalam kontestasi di pilkada periode tahun 2005-2008 melalui jalur perseorangan yaitu sebesar 14% dari total keseluruhan pasangan calon baik perseorangan maupun partai politik. Persentase ini meningkat menjadi 56% pada periode tahun 2010 - 2013. Tetapi, persentase tersebut cenderung menurun pada pilkada serentak tahun 2015 menjadi sebesar 31,6%, pada pilkada serentak tahun 2107 menjadi sebesar 24% dan pada pilkada serentak tahun 2018 kembali menurun menjadi sebesar 15%. Meskipun calon perseorangan memiliki kesempatan politik untuk mencalonkan diri dalam arena elektoral, masih banyak kasus calon perseorangan sering kali menemukan kegagalan sebelum "berperang". Pencalonan pasangan calon

perseorangan sering mengalami hambatan terkait persyaratan pencalonan karena regulasi terutama syarat minimum dukungan ([Mahpudin, 2020](#)).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 hingga perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mewajibkan pasangan calon perseorangan untuk memenuhi syarat minimum dukungan. Bagi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur jumlah dukungan nya 6.000.000 jiwa sampai 12.000.000 jiwa dan harus didukung paling sedikit 7,5 % jumlah penduduk di provinsi. Bagi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati serta bakal pasangan calon Walikota dan wakil Walikota jumlah dukungan nya 250.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa harus di dukung paling sedikit 3 % dan telah direvisi lebih besar yaitu sebesar 6,5 % penduduk di kabupaten/kota, dengan syarat dukungan tersebut dibuktikan melalui fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), hal ini menjadikan pasangan calon perseorangan harus memiliki sumber daya (modal) yang tidak sedikit dalam mencari syarat minimum dukungan (lihat tabel 1). Persyaratan minimum dukungan ini kerap kali membuat pasangan calon menemukan kesulitan terutama terhadap pasangan calon perseorangan yang lahir dari masyarakat tanpa kendaraan politik apapun. Berbeda dengan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, beban pemenuhan jumlah dukungan minimal pasangan calon jalur perseorangan harus dihadapi sendiri, sedangkan partai politik bekerja meraih dukungan minimal secara sistematis melalui organisasi partai maupun oleh calon legislatif sejak pemilu legislatif.

**Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Syarat Dukungan Calon Perseorangan**

Daerah	Jumlah Penduduk	UU 12/2008	UU 1/2015	UU 8/2015	UU 10/2016	
		Presentasi Dukungan (%)	Presentasi Dukungan (%)	Presentasi Dukungan (%)	Jumlah Pemilih	Presentasi Dukungan (%)
Provinsi	2,000,000	6.5	6.5	10	2,000,000	10
	2,000,000 - 6,000,000	5	5	8.5	2,000,000 - 6,000,000	8.5
	6,000,000-12,000,000	4	4	7.5	6,000,000-12,000,000	7.5
	Lebih dari 12,000,000	3	3	6.5	Lebih dari 12,000,000	6.5
tersebar di 50 % kabupaten/kota						
Kab/Kota	250,000	6.5	6.5	10	250,000	10
	250,000-500,000	5	5	8.5	250,000-500,000	8.5
	500,000-1,000,000	4	4	6.5	500,000-1,000,000	7.5
	Lebih dari 1,000,000	3	3		Lebih dari 1,000,000	6.5
Tersebar di 50 % kecamatan						

Sumber: diolah dari UU 12/2008, UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016 ([Perludem, 2017](#))

Proses pemenuhan syarat minimum dukungan bagi pasangan calon perseorangan dapat digambarkan sebagai arena politik yang didalamnya mengandung pertarungan akumulasi terhadap kepemilikan modal (*capital*) yang menyertainya selama kontestasi. Menurut Pierre

Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah mempunyai arti. Legitimasi aktor sosial dalam tindakan sosial yang dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Modal dapat dipertukarkan dan di akumulasi satu sama lainnya. Akumulasi modal merupakan hal yang sangat penting di dalam ranah (Harker, 2009).

Peran modal pasangan calon menjadi faktor penting dalam mengatasi kesulitan dalam mengumpulkan syarat minimum dukungan. Tersedianya modal politik (*politic capital*) dan modal sosial (*social capital*) diharapkan memperlancar proses pasangan calon untuk menyediakan dan memenuhi syarat minimum dukungan. Modal politik adalah metafora yang digunakan dalam teori politik untuk mengkonseptualisasi akumulasi sumber daya dan kekuatan yang dibangun melalui hubungan, kepercayaan, niat dan pengaruh antara politisi atau partai dan pemangku kepentingan lainnya, seperti 'konstituen'. Selain itu modal politik dapat dipahami sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan atau memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan (Casey, 2008). Selanjutnya pengertian modal sosial yang merupakan bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon mampu menyakinkan pemilih bahwa mereka memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya.

Telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan mengenai modal pasangan calon yang maju dalam kontestasi pemilihan di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nora Altika (2012) yang berjudul *Faktor Penentu Kemenangan OK Arya Zulkarnain di Kecamatan Limapuluh*. Dalam penelitian tersebut kemenangan pasangan calon OK Arya Zulkarnain dan Gong Matua Siregar dari jalur perseorangan pada pilkada kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tahun 2008, tidak lepas dari pasangan calon menggunakan modal yang dimiliki nya. Kepemilikan modal tersebut berupa figur OK Arya Zulkarnain yang populer sebagai putra daerah yang dianggap memahami permasalahan dan berjuang untuk kabupaten Batubara, penggunaan organisasi Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara (GEMKARA) untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan manajerial organisasi pemenangan yang tertata atau tersusun secara sistematis yang baku menjadikan pentingnya kepemilikan modal pasangan calon tersebut dalam memenangkan pilkada Batubara.

Kemudian adanya peran modal bagi calon untuk menembus kandisasi partai politik seperti penelitian Kurniawati Hastuti Dewi., et. all (2018), yang berjudul *Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung*, dimana modal individu (finansial, keterampilan sosial, latar belakang keluarga) dan modal sosial yang dinilai kuat menjadi dasar bagi politisi perempuan untuk menembus kandidasi partai politik. Temuan dari penelitian tersebut semakin memperkuat pentingnya mendorong banyak perempuan politisi yang muncul dalam pilkada langsung karena kredibilitas, modal individu dan modal sosial yang kuat, dan bukan hanya karena 'ikatan keluarga' atau 'faktor kekerabatan' bukan semata sebagaimana yang selama ini yang digunakan politisi perempuan dalam kandidasi politik.

Berbeda dengan dua penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pasangan calon melalui peran modal dalam memenuhi syarat minimum dukungan pada pelaksanaan pilkada kabupaten Garut tahun 2018 di tengah kecenderungan menurunnya partisipasi pasangan calon perseorangan dalam pencalonan pilkada di Indonesia. Upaya pasangan calon melalui peran modal diharapkan menjadi kekuatan pasangan calon dalam

memenuhi syarat minimum dukungan. Pemenuhan syarat minimum dukungan pada pencalonan jalur perseorangan dapat diatasi dengan peran kepemilikan modal yang tepat.

Pada tahapan pencalonan pilkada kabupaten Garut 2018, syarat minimum dukungan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3205/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017 adalah sebesar 117.346 dukungan yang tersebar di lebih dari 50% kecamatan atau tersebar paling sedikit di 22 kecamatan harus dapat dipenuhi pasangan calon. Pasangan calon harus berjuang dengan modal yang dimilikinya untuk memenuhi syarat minimum dukungan tersebut.

Pada saat pemenuhan syarat minimum dukungan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dapat mengungguli 3 (tiga) pasangan calon lainnya yaitu pasangan calon Dedi Supriadi dan Muhammad Ali yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi, Udan Hidayat dan Dayu AG tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon karena tidak dapat menyerahkan syarat dukungan berupa Model B.2-KWK Perseorangan dan mengundurkan diri dari pendaftaran dan pasangan calon Soni Sondani dan Usep Nurdin tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena dinyatakan tidak lulus verifikasi serta Soni Sondani menjadi tersangka dalam kasus penyuapan terhadap penyelenggara pemilu ([KPU Kabupaten Garut, 2018](#)).

**Tabel 2 Daftar bakal pasangan calon pada penyelenggaraan pilkada kabupaten Garut 2018**

Nama Pasangan Calon	Nama LO	Jumlah Minimum Dukungan	Jumlah dukungan		Sebaran Kecamatan	Status
			Sebelum verifikasi	Setelah Verifikasi		
Dedi Supriadi dan Muhammad Ali	Isep Misbah	117.346	136.500	-	23 kecamatan	Tidak Memenuhi
Soni Sondani dan Usep Nurdin,	Didin Wahyudin	117.346	129.756	67.468	41 kecamatan	Tidak Memenuhi
Suryana, dan Wiwin Suwindaryati,	Irpan Saepuloh	117.346	145.644	125.598	40 kecamatan	Memenuhi
Udan Hidayat, dan Dayu AG	Agus Solihin	117.346	-	-	-	Tidak Memenuhi

Sumber: [KPU Kabupaten Garut, 2018](#)

Keberhasilan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati mendapatkan dukungan sebesar 125.598 dukungan dengan sebaran kecamatan sejumlah 40 kecamatan dari jumlah minimum 117.346 dukungan dengan sebaran paling sedikit 22 kecamatan yang ditetapkan KPU kabupaten Garut, menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam tahapan pencalonan. Keunggulan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati tidak lepas dari modal yang dimiliki pasangan tersebut. Kepemilikan modal Suryana dan Wiwin Suwindaryati berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk baik materi maupun simbol tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Modal tersebut dipandang

Pierre Bourdieu sebagai basis dominasi atau kekuatan. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya.

Ada dua bentuk modal yang terlihat dalam pencalonan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati yaitu modal politik (*politik capital*) berupa kekuatan bakal calon yang dapat dilihat dari *pertama*, aktivitas/pengalaman bakal pasangan calon seperti organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, menjadi anggota partai politik (kapasitas politik, pengalaman politik, kedudukan politik dan posisi strategis bakal pasangan calon dalam lembaga politik). *Kedua*, dukungan elit politik lokal sebagai pemberi motivasi dan penyedia basis massa. *Ketiga*, adanya tim sukses yang bekerja maksimal dan berpihak pada bakal pasangan calon.

Kemudian penggunaan modal sosial berupa sumber daya aktual dan potensial bakal pasangan calon, para bakal pasangan calon tidak hanya dikenal para pemilih (*voters*) namun juga dengan modal sosial para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan calon ini layak mendapat dukungan atau tidak. *Pertama*, apabila seorang calon dianggap memiliki modal sosial, berarti calon tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga masyarakat dalam hal ini pemilih memberikan kepercayaan kepada calon untuk menjadi pemimpin. *Kedua*, calon yang telah dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat artinya antara calon dengan masyarakat sudah terbangun interaksi sosial yang saling menguntungkan. *Ketiga*, calon yang telah dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat artinya antara bakal pasangan calon dengan masyarakat sudah terbangun interaksi sosial yang saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai peran dua modal yang dimiliki yaitu modal politik dan modal sosial pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam pemenuhan syarat minimum dukungan, pertanyaan penelitian ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana peran modal politik dan modal sosial pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam pemenuhan syarat dukungan pada tahapan pencalonan di pilkada kabupaten Garut tahun 2018?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*case study*) dengan metode kualitatif yang berfokus pada studi intensif dari satu kasus sebagai tujuan penelitian ini atau setidaknya sebagian penelitian untuk menjelaskan kelas kasus (populasi) yang lebih besar ([Gerring, 2007](#)). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi, pengajuan pertanyaan terbuka pada partisipan dan rekam catatan-catatan lapangan, analisa data berdasarkan tema dan kategori, pencarian pola umum, generalisasi, atau teori dari tema atau kategori yang dibuat. Proses ini diakhiri generalisasi atau teori dari literatur-literatur dan pengalaman ([Creswell, 2017](#)). Lokasi penelitian berada di kabupaten Garut, sebagai lokasi penyelenggaraan pilkada tahun 2018 yang menghadirkan dinamika pada tahapan pencalonan pasangan calon dari jalur perseorangan. Dinamika yang hadir pada tahapan pencalonan tersebut dapat dilihat dari peran modal politik dan modal sosial pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati melalui jalur perseorangan dalam menyediakan syarat dukungan minimum pada proses pencalonan pilkada tahun 2018.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui sumber data primer yaitu dari pemeriksaan dokumentasi lembaga serta wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) pihak-pihak yang terlibat langsung atau mengetahui secara langsung peristiwa pencalonan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018. Selain itu dengan melalui sumber data sekunder dilakukan dengan studi pustaka.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Modal Politik Pasangan Calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018

Dalam sebuah kontestasi politik, modal politik menjadi salah satu modal dasar yang harus dimiliki para pasangan calon untuk maju bertarung dalam sebuah pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Untuk maju menjadi calon kepala daerah dibutuhkan modal politik, karena dengan adanya modal politik, calon tersebut dapat membangun relasi politik yang memperkuat basis pendukungnya. Relasi ini meliputi hubungan jaringan dengan seluruh komponen dari lembaga tradisional hingga lembaga modern serta elit-elit yang ada di daerah tersebut (Tomaito, 2011).

Temuan John A. Booth and Patricia Bayer Richard (1998) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kelompok/organisasi yang lebih formal dan tingkat politik yang lebih tinggi, yang didukung oleh organisasi komunal seperti organisasi masyarakat yang dapat berhubungan dengan kekuasaan dan mempunyai kemampuan membujuk pemilih yang terdaftar untuk memberikan suaranya atau bekerja untuk kampanye dalam sebuah pemilihan dapat mencapai kekuasaan atau demokrasi. John A. Booth and Patricia Bayer Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi.

Modal politik juga dapat diartikan sebagai sejumlah kekuatan calon dari aktivitasnya di dalam organisasi formal sebelumnya yang didukung oleh para elit politik lokal dari organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan bahkan partai politik yang dianggap mewakili kepentingannya. Selain itu calon harus memiliki tim sukses yang mempunyai kemampuan untuk membujuk pemilih yang terdaftar dan yang memiliki kemampuan untuk melakukan kampanye calon dan calon harus dapat memastikan bahwa tim sukses dan seluruh jaringannya selalu bekerja maksimal dan berpihak padanya.

##### 3.1.1. Aktivitas/Pengalaman Organisasi

Dukungan masyarakat terhadap pencalonan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati melalui jalur perseorangan pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018 tidak lepas dari modal politik yang berasal dari peran aktivitas organisasi pasangan calon tersebut sebelum maju dalam pencalonan. Suryana, calon yang dianggap religius dan sederhana oleh pendukungnya ini, berusia 43 tahun pada saat pencalonan, memiliki latar belakang pendidikan keagamaan di sekolah formal pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Garut pada tahun 1987-1990, Suryana juga menempuh pendidikan informal pada pondok pesantren Miftahul Ulum di daerah Pamulihan kabupaten Garut pada tahun 1989-1999. Setelah lulus sekolah, Suryana melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta dari tahun 1995-2002. Dari modal pendidikan keagamaan, Suryana banyak berkecimpung dalam lingkungan pesantren di kabupaten Garut. Sebagai pengurus pondok pesantren Sukaraja di wilayah Karangpawitan kabupaten Garut, Suryana yang biasa dipanggil "bah Ius" ini (karena karakter yang dianggap bijaksana dan panutan bagi kaum muda terutama para santri) sehari-harinya bergaul dengan para kyai, ulama dan tokoh masyarakat di berbagai pondok pesantren karena wilayah Garut banyak berdiri pondok-pondok pesantren. Selain itu Suryana aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan seperti pernah menjadi sekretaris gerakan pemuda Ansor tahun 2002-2007 dan pernah menjabat menjadi sekretaris Tanfidz pada

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Garut periode tahun 2010-2015. Hal tersebut diungkapkan oleh Suryana:

*“...saya belum pernah di birokrasi, kalau organisasi banyaklah, dulu saya pernah jadi Sekretaris Tanfidz NU, menjadi bagian dari Ansor dan basic saya pesantren...” (Wawancara Suryana, 21 April 2021).*

Modal politik Suryana untuk mendapat dukungan dalam pencalonan berupa perannya dalam aktivitas di bidang organisasi keislaman membawa relasi politik Suryana kepada sebagian masyarakat Garut yang terkenal dengan masyarakat yang islami. Kabupaten Garut yang dikenal dengan mayoritas masyarakat yang beragama islam memiliki perhatian lebih terhadap politik, hal tersebut diungkapkan oleh Prof Jusman Iskandar (Direktur Pascasarjana Universitas Garut):

*“...latar belakang sosial yang menarik ya, Garut itu sejak tahun 1920an yang lalu merupakan wilayah perkembangan kegiatan politik para putra-putra Garut ya melakukan berbagai pengorganisasian kegiatan-kegiatan mereka, misalnya di Garut Serikat Islam sebelum tahun 1920 sudah aktif sekali, mereka bukan hanya bergerak dibidang keagamaan tetapi juga mereka mematangkan rakyat Garut tentang “negara di masa depan” kira-kira seperti begitu. Kemudian diantara pemimpian mereka Aruji Kartawinata bekas pahlawan nasional, termasuk yang ekstrim itu adalah Katrosuwiryo yang kemudian menjadi tokoh DI/TII. Nah jadi kehidupan politik masyarakat Garut itu sampai hari ini tetap berkembang seperti itu, Jadi persoalan politik adalah gaya hidup atau kehidupan yang terjadi pada masyarakat Garut, itu yang menyebabkan mereka sangat perhatian sekali dengan peristiwa-peristiwa politik sekalipun dengan pemilihan umum...” (Wawancara Prof Jusman Iskandar, 3 Mei 2021).*

Selain itu Suryana juga memiliki pengalaman sebagai konsultan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa mitra Kementerian Desa (Kemendesa), peran pengalaman pernah menjadi mitra Kemendes langsung maupun tidak langsung menciptakan relasi sosial Suryana untuk mendapatkan dukungan tidak hanya kalangan pondok pesantren tetapi juga kalangan petani, buruh dan nelayan yang merupakan profesi mayoritas masyarakat desa di kabupaten Garut.

Peran pengalaman organisasi lainnya sebagai modal politik yang tidak kalah penting bagi Suryana adalah Suryana sebagai ketua tim sukses pasangan calon Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra pada pilkada kabupaten Garut tahun 2008. Peran pengalaman sebagai ketua tim sukses dari pasangan calon perseorangan yang pertama memenangkan kontestasi pilkada di kabupaten Garut membawa Suryana memiliki relasi politik dengan para mantan pendukung Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra. Simpul-simpul jaringan pendukung Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra dimanfaatkan Suryana untuk mendapatkan dukungan pada tahapan pencalonan. Dengan perolehan suara Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra pada pilkada kabupaten Garut tahun 2008 tahap kedua sebesar 535.289 suara mengungguli pasangan calon Rudi Gunawan dan Oim Abdurohim menjadi potensi besar bagi Suryana untuk meraih banyak dukungan.

Dukungan peran pengalaman organisasi sebagai modal politik pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati juga berasal dari Wiwin Suwindaryati sebagai wakil. Wiwin Suwindaryati yang pada pencalonan berusia 54 tahun ini, memperoleh gelar sarjana hukum di sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 1991. Selain dianggap sebagai pengusaha wanita yang sukses, Wiwin Suwindaryati juga memiliki pengalaman organisasi yaitu sebagai ketua Majelis

Dizkir Annisa Nurussalam Jawa Barat, relasi politik Wiwin Suwindaryati kepada masyarakat garut banyak terjadi melalui pengajian yang ikuti oleh ibu-ibu dan remaja (pemilih pemula).

Selain itu peran pengalaman organisasi Wiwin Suwindaryati sebagai modal politik dalam pencalonannya adalah sebagai kader partai Nasdem dari tahun 2013. Sebagai kader awal partai Nasdem di Garut Wiwin Suwindaryati memungkinkan untuk dapat berkenalan dekat secara langsung dengan legislator dan juga tokoh-tokoh politik nasional terutama yang memiliki relasi politik dengan masyarakat Garut. Walaupun pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018 dukungan terhadap Partai Nasdem jatuh pada pasangan Rudi Gunawan dan Helmi Budiman namun secara ikatan emosional kader Partai Nasdem kepada Wiwin Suwindaryati sebagai kader lama atau kader awal berdirinya partai Nasdem di kabupaten Garut mempengaruhi dukungan beliau dalam pencalonan jalur perseorangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wiwin Suwindaryati:

*“...pengalaman berpolitik, saya ikutin aja, di Nasdem saya dari tahun 2013, dari mulai Nasdem didirikan oleh Surya Paloh, saya kebetulan awalnya aktif di kegiatan sosial, organisasi perempuan khususnya menjabat ketua Majelis Dzikir Annissa Nurussalam Jawa Barat.... (Wawancara dengan Wiwin Suwindaryati, 25 Mei 2021).*

### 3.1.2. Dukungan Elit Politik Lokal

Pada tahapan pencalonan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati, peranan dan fungsi dari tokoh agama dalam menciptakan atau membentuk opini masyarakat Garut untuk mendukung pencalonan beliau sangatlah penting. Kultur masyarakat Garut yang sudah menjadi ciri khas sebagai kultur santri menjadi basis massa dukungan yang penting bagi setiap pasangan calon khususnya pasangan calon dari jalur perseorangan. Pendidikan serta bimbingan dari tokoh agama di Garut dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat Garut agar dapat berpartisipasi dengan baik pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018.

Melalui modal politik Suryana berupa pengalaman organisasi keislaman serta latar belakang pendidikan pesantren serta Wiwin Suwindaryati sebagai salah satu ketua majelis dzikir mempermudah pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati masuk dalam komunitas-komunitas pengajian-pengajian di Garut serta menggandeng tokoh agama untuk memberikan dukungan. Salah satu tokoh agama yang mendukung terhadap pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati adalah sesepuh pondok pesantren Sukaraja yang merupakan salah satu pondok pesantren besar di Garut dan tokoh ulama NU kabupaten Garut yaitu KH Deden Abdul Hakim. Dukungan beliau terhadap pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati tidak lepas dari Suryana sebagai pengurus pondok pesantren Sukaraja. KH Deden Abdul Hakim yang merupakan cicit dari Kyai Zaenal Arif Sukaraja yang merupakan pendiri pondok pesantren Sukaraja yang memiliki pengaruh terhadap pondok pesantren lain yang tersebar di Jawa Barat termasuk Garut.

*“Jaringan keilmuan pesantren Sukaraja Garut terhubung dengan Syaikhona Kholil Bangkalan (1925) melalui dua sosok ajengan Kyai Zaenal Arif (pendiri) dan Kyai Ahmad Adzra'i (menantu Kyai Zaenal Arif). Pesantren Sukaraja pada masa kepemimpinan Kyai Ahmad Adzra'i tercatat sebagai kiblat studi kita Alfiyyah Ibn Malik sebagai rujukan ilmu tata bahasa Arab tingkat lanjutan dan menurunkan sejumlah murid yang menjadi para ajengan besar Sunda, yang pesantren-pesantrennya terkenal dengan “Jaringan Pesantren Alfiyyah di Tata Sunda” pada paruh kedua abad 20 Masehi”. (Sya'ban, 2020).*

Selain itu kehadiran KH. Deden Abdul Hakim dalam pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati terutama tahapan mengumpulkan syarat dukungan menjadi faktor yang penting karena pengaruh ketokohan KH Deden Abdul Hakim untuk menarik basis dukungan warga NU (Nahdiyyin) kabupaten Garut.

*“...Secara kultural dukungan Nahdiyyin lumayan masih saya dapat 130 ribuan dukungan kira-kira sekitar 12 % total dukungan namun secara struktural NU tidak bersikap... (Wawancara Suryana, 21 April 2021).*

### 3.1.3. Tim Sukses Bakal Pasangan Calon

Modal politik selanjutnya adalah peran tim sukses pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam upaya untuk meraih syarat minimum dukungan pada tahapan pencalonan. Tim sukses dapat merupakan tim pemenangan di luar partai politik pengusung yang lazim hadir dalam setiap pencalonan pasangan calon pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Tim sukses diartikan sebagai tim yang membantu pasangan calon dalam setiap tahapan pemilihan salah satunya dengan mencarikan suara/dukungan pemilih untuk pasangan calon. Tim sukses memiliki arti sekelompok orang yang bertugas untuk memperjuangkan calon yang diusungnya (calon Presiden, calon Gubernur, calon Bupati / calon Walikota) agar berhasil meraih kemenangan dalam suatu pemilihan (Tawakkal, et. al 2020).

Tim sukses pasangan calon perseorangan adalah tim sukses yang dibentuk mandiri/Sendiri oleh pasangan calon sebelum pencalonan sebagai upaya dalam memetakan, merumuskan dan merancang strategi pemenangan pasangan calon dalam kontestasi pilkada. Terutama pada tahapan pengumpulan syarat minimum dukungan peran tim sukses sangat penting melalui tugasnya untuk melakukan kajian terhadap identifikasi besaran pendukungnya, masa mengambang dan pendukung kontestan lainnya.

Berbekal pengalaman menjadi ketua tim pemenangan pasangan calon Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra yang berhasil mengantarkan kemenangan pada pilkada kabupaten Garut tahun 2008, pembentukan tim sukses pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati diisi dengan sebagian besar mantan tim sukses pasangan calon Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra yang telah terbentuk lama dan dikenal solid. Tim sukses Suryana dan Wiwin Suwindaryati terdiri atas jaringan tingkat kabupaten, dibantu dengan jaringan/koordinator kecamatan dengan setiap koordinator terdiri minimal 5 orang dari 42 kecamatan di kabupaten garut yang dibentuk sampai tingkat desa hingga tingkat RW/RT. Hal tersebut diungkapkan Wiwin Suwindaryati:

*“... tim sukses menjadi faktor penting, bukan hanya untuk KTP. Jaringan ini sangat penting, jadi kalau saya kemarin udah ngebentuk tim sukses kecamatan, nah dari kecamatan ini langsung ke tingkat desa. Produknya bagus, yang menjualnya tidak bagus mungkin tidak lolos, tapi produk tidak bagus, packaging nya bagus pasti menang. Jadi kalau produk bagus, dipasarkan oleh orang bagus pasti menang...” (Wawancara dengan Wiwin Suwindaryati, 25 Mei 2021).*

Tim sukses masing-masing tingkatan berkoordinasi satu sama lainnya dengan tugas mensosialisasikan program unggulan bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati ke masyarakat paling bawah (*grassroot*). Selain itu, kewajiban tim sukses pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati untuk membawa dukungan minimal 10 orang pendukung di lingkungan terdekat khususnya keluarga yang mempunyai hak pilih menjadi faktor penting.

*“... struktur kita kemari ada korcam terdiri dari 5 orang, kordes 5 orang dan koordinator di RT/RW... Kita kan hitungnya 3 % dari jumlah pemilih, 6 % dari jumlah penduduk, strategi*

yang saya bangun kemarin itu pokoknya satu orang itu koordinator mengumpulkan minimal sepuluh KTP dukungan minimal keluarga dulu, disitulah kita dorong pengumpulannya... (Wawancara Suryana, 21 April 2021).

### 3.2. Modal Sosial Pasangan Calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018

Pembahasan tentang modal sosial lazim dikaitkan dengan upaya mengelola, meningkatkan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial (termasuk di dalamnya dukungan politik). Relasi-relasi sosial tersebut diendapi oleh norma-norma yang memberikan jaminan, nilai-nilai yang menghargai perkembangan (*trust*), serta melembagakan hubungan yang saling menguntungkan (*reciprocal relationships*). Karakteristik modal sosial bersifat *less tangible* (tidak begitu kasat mata). Modal sosial baru dapat diketahui keberadaannya atau dapat diidentifikasi gejalanya hanya apabila orang menjalin relasi-relasi sosial. Dalam sosiologi, analisis modal sosial pada umumnya fokus pada level kelompok, komunitas (*community*) dan masyarakat (*society*) (Usman, 2018).

Menurut Pantouw modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal lainnya. Memiliki modal sosial berarti calon dikenal oleh pemilih. Pemilih mengenal mereka, secara fisik dan sosial, yang berarti mereka dapat membuat penilaian yang lebih baik tentang apakah kandidat layak dipilih atau tidak. Calon yang memiliki modal sosial berarti tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin (Pantouw, 2012).

Menurut Pierre Bourdieu dan Wacquant (1992) *Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition*. Dalam definisi tersebut Pierre Bourdieu menyampaikan bahwa elemen-elemen di dalam modal sosial meliputi sumber daya (*resources*) baik aktual maupun virtual (*potensial*), jejaring relasi-relasi yang saling menghargai atau memberi perhatian (Usman, 2018). Sumber daya (*resources*) aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan dengan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa institusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu) (Hermawanti, 2002).

Aspek penting yang diperhatikan Bourdieu dalam membahas modal sosial adalah sumber daya yang terkait dengan keanggotaan kelompok dan jejaring sosial. Jumlah modal sosial yang dimiliki oleh aktor-aktor bergantung pada ukuran jejaring koneksi yang dapat mereka gerakkan secara efektif (Usman, 2018).

#### 3.2.1. Kepercayaan Pendukung terhadap Pasangan Calon

Upaya pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat dukungan minimum tidak lepas dari peran modal sosial yang terbentuk melalui kepercayaan

timbal balik antara pasangan calon dengan pendukung. Jalinan hubungan yang berlandaskan kepercayaan secara berkelanjutan dan berlangsung lama, seperti jalinan pertemanan, keluarga, satu daerah dan satu organisasi politik atau sosial akan memiliki pengaruh dan kedekatan khusus di dalam masyarakat. Jalinan hubungan yang khusus baik secara fisik, sosial maupun emosional antara pasangan calon dengan masyarakat melahirkan sikap dan perasaan percaya dari masyarakat kepada pasangan calon yang akhirnya akan dapat merebut kepercayaan masyarakat untuk maju dalam kontestasi pilkada.

Modal sosial berupa kepercayaan timbal balik antara Suryana dan Wiwin Suwindaryati dengan pendukungnya diperoleh dengan proses yang lama, kepercayaan tersebut dibangun melalui karir politik dan citra positif sosok Suryana sebagai ustaz dan pengurus pondok pesantren serta Wiwin Suwindaryati sebagai perempuan asli Garut yang sukses dalam bisnis jauh sebelum mereka mencalonkan diri melalui jalur perseorangan pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018. Terkait kepercayaan masyarakat Garut untuk mendukung pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati dinilai paling tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap pasangan calon lainnya dapat dilihat hasil rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pilkada kabupaten Garut tahun 2018 (lihat tabel 3).

**Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018**

No	Nama Calon	Minimal Dukungan Perbaikan	Jumlah Dukungan Perbaikan	Penelitian Dukungan			Jumlah Total Dukungan Yang Memenuhi Syarat
				MS	TMS	Jumlah	
1	Soni Sondani dan Usep Nurdin	151.588	176.675	25.916	150.759	176.675	67.468
2	Suryana dan Wiwin Suwindaryati	99.700	165.204	58.102	107.102	165.204	125.598

Sumber: [KPU Kabupaten Garut, 2018](#)

Kapasitas politik Suryana tidak diragukan oleh masyarakat, karena Suryana sudah lama terjun dalam politik Garut dan memiliki modal politik berupa pengalaman organisasi sebagai tim pemenangan Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra pada pilkada kabupaten Garut tahun 2008 dan Sekretaris Tanfidz NU serta anggota Ansor menjadikan layak untuk dipercaya masyarakat Garut maju dalam pencalonan pasangan calon jalur perseorangan pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018. Selain itu kepercayaan masyarakat Garut untuk mendukung Suryana lahir dari penilaian sosok Suryana sebagai sosok pemimpin yang agamis, sederhana dan pandai bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat.

Kemudian kapasitas Wiwin Suwindaryati dalam politik sebagai anggota senior partai Nasdem dan maju sebagai satu-satunya calon perempuan dalam kontestasi pilkada menambah kepercayaan masyarakat Garut pasangan tersebut membawa perubahan bagi Garut. Selain itu sosok Wiwin Suwindaryati dikenal sebagai pengusaha sukses yang berjiwa sosial atau dermawan, yang sering membantu masyarakat. Wiwin Suwindaryati banyak melakukan kegiatan sosial sebelum pencalonan pasangan tersebut.

Kepercayaan yang dibentuk antara bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dengan masyarakat Garut melalui pendekatan secara fisik dan sosial seperti Suryana sering mengisi ceramah di berbagai kegiatan keagamaan, hadir di berbagai majelis taklim, hadir dalam pernikahan keluarga tokoh masyarakat dan lain-lain. Selanjutnya pendekatan emosional antara bakal pasangan calon dengan pendukung lainnya tergambar dari sosok Suryana sebagai ustaz serta Wiwin Suwindaryati sebagai perempuan asli Garut yang sukses yang dapat menjadi pemimpin Garut kedepan.

Disamping itu untuk melahirkan kepercayaan pendukung melalui pendekatan emosional pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati menciptakan slogan yang merakyat melalui "kami calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan (*independen*) bersama-sama dengan segenap masyarakat Garut akan bahu membahu bekerja kerjas menjemput keberkahan dari Allah SWT, agar Garut menjadi harum semerbak "Ngadalingding" namanya di Bumi Pertiwi Indonesia tercinta". Slogan tersebut dilengkapi dengan visi "Garut Berkah, Mandiri, Berdaulat, Adil dan Makmur" untuk memberikan kepercayaan kepada pendukung nya arah kepemimpinan Garut apabila bakal pasangan calon tersebut terpilih.

### 3.2.2. Interaksi Sosial Suryana dan Wiwin Suwindaryati

Peran modal sosial lainnya yang dimiliki pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat dukungan minimum pada pencalonan adalah berupa hubungan sosial atau interaksi sosial di antara anggotanya (personalnya) dalam lingkungan sosialnya, hal ini dapat berupa hubungan personal dengan kelompok atau organisasi sosial tertentu atau berupa hubungan sosial antar kelas/kelompok dan organisasi sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat Garut.

Peran modal sosial ini terlihat apabila pasangan calon dengan masyarakat terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan akan mempengaruhi proses dukungan masyarakat terhadap pasangan calon khususnya jalur perseorangan. Interaksi sosial yang terjalin dengan baik akan melahirkan persepsi, penilaian dan respon yang baik dalam pandangan masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dengan pertemuan intensif dengan hampir semua kalangan masyarakat di Garut terutama kalangan pondok pesantren, komunitas pengajian, komunitas pemuda, pedagang, pertani dan nelayan. Sebagai seorang Ustadz/pendakwa Suryana dapat masuk ke dalam berbagai komunitas dan menghadiri berbagai acara seremonial yang mengundang banyak warga (masyarakat) Garut. Hal tersebut diungkapkan Suryana:

*"...kita bekerja menyakinkan karena ini soal market idea, market ide menawarkan gagasan ke orang itu, ternyata apa yang saya tawarkan ada yang disukai dan tidak disukai, kita tawarkan gagasan yang terbaik masyarakat tidak tertarik dengan gagasan kita bisa jadi ada masyarakat yang tertarik 50 ribu pada hari H juga ada, yang pasti ada yang menarik itu saya mengisi pengajian itu selama kampanye itu hampir 184 panggung, dari kegiatan-kegiatan bidar, isra mi'raj, mengundangkannya, ya saya ceramah sisipkan sedikit ajakan mendukung, rata-rata banyak mengundang saya, artinya wadahnya sudah ada... (Wawancara Suryana, 21 April 2021).*

Upaya lain yang dilakukan Suryana dalam konteks interaksi sosial dengan masyarakat Garut ialah Suryana dan tim sukses nya masih memelihara interaksi sosial dengan mantan pendukung Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra, interaksi sosial yang dibangun Suryana untuk mendapat dukungan mantan pendukung Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra melalui narasi:

"kenapa harus independen? Pada tahun 2008, Kabupaten Garut dipimpin oleh Bupati dan Wakil dari jalur perseorangan (independen). Pertanggungjawaban independen tidak tersekat oleh partai, melainkan langsung kepada rakyat dan rakyat bisa mengawasi secara langsung atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati, karena pada prinsipnya Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan adalah "dari Rakyat, oleh Rakyat dan Untuk Rakyat", maka sangat tepat jika seluruh masyarakat kabupaten Garut mendukung dan memilih Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut tanggal 27 Juni 2018 nanti" (Iklan Selebaran #Garut Ngadalingding, 2018).

Hal yang sama dilakukan Wiwin Suwindaryati dalam interaksinya dengan masyarakat Garut untuk mendapatkan dukungan pada pencalonannya. Wiwin Suwindaryati yang terkenal sebagai pengusaha perempuan sukses Garut yang sering membantu masyarakat Garut yang kesusahan dan seringnya beliau memberikan bantuan materi untuk kegiatan-kegiatan sosial di wilayah Garut. Sebagai perempuan Wiwin Suwindaryati banyak melakukan interaksi sosial kepada keluarga khususnya perempuan dan pemilih pemula melalui fokus memperjuangkan hak perempuan dan anak di Garut. "Menurut Wiwin Suwindaryati, jika dalam pemilihan nanti dirinya terpilih, ia merencanakan akan memperkuat fungsi peranan wanita serta PKK. Dia juga akan memantapkan peran dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak." ([Suarametroindonesia.com](http://Suarametroindonesia.com), 2018).

Interaksi sosial yang dilakukan Suryana dan Wiwin Suwindaryati menunjukkan bahwa proses membentuk modal sosial bagi Suryana dan Wiwin Suwindaryati untuk mendapat dukungan pada pencalonan dilakukan dengan masuk kedalam simpul-simpul suara yang potensial melalui komunitas keagamaan seperti pondok pesantren dan majelis-majelis tazlim serta unit sosial terkecil seperti keluarga yang didalamnya terdapat perempuan dan pemilih pemula (anak-anak).

### 3.2.3. Jaringan Relasi Sosial Suryana dan Wiwin Suwindaryati

Peran jaringan relasi sosial merupakan modal sosial penting yang digunakan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimum dukungan pada proses pencalonan nya melalui jalur perseorangan. Hal tersebut karena jaringan sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang berkontribusi terhadap kesuksesan pasangan calon dalam pilkada. Prinsip-prinsip hubungan sosial dalam jaringan sosial masyarakat pemilih sangat mempengaruhi bahkan menentukan sebuah pilkada, sebab dengan memahami hakekat dari hubungan-hubungan sosial tersebut dapat dibuat prediksinya tentang logika situasional (aturan-hukum-norma) yang diciptakannya, jenis kontrol dan jenis pertukaran yang berguna untuk merumuskan program-program dan strategi pemenangan pilkada yang tepat, merumuskan materi kampanye signifikan dan memanfaatkan aktor-aktor yang mempunyai posisi penting untuk *channel* komunikasi dalam membangun image atau pencitraan serta berguna untuk membangun kesepakatan-kesepakatan demi perolehan suara/dukungan yang maksimal ([Agusyanto, 2011](#)).

Jaringan sosial yang dibuat oleh pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati menyasar banyak pendukung dari berbagai komunitas dan profesi masyarakat Garut. Hampir semua komunitas masyarakat Garut ada yang memberikan dukungan kepada Suryana dan Wiwin Suwindaryati, hal tersebut diungkapkan Wiwin Suwindaryati:

“...jaringan banyak, dari pengusaha, banyak juga dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kalau di Garut sekian persen itu dari LSM hari 45 % kan kebanyakan LSM. Nah itu hampir 80 % LSM kita... (Wawancara dengan Wiwin Suwindaryati, 25 Mei 2021).”

Hal lain yang sama juga disampaikan oleh Suryana:

“...kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung pada saat pencalonan ada beberapa, kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok-kelompok keagamaan, kelompok pemuda, karang taruna, pengusaha dan masih banyak lainnya... (Wawancara Suryana, 21 April 2021).”

Selain itu walaupun beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) bersikap *independen* tidak mendukung secara struktural, namun anggota-anggota secara personal menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati misalnya anggota Ansor kabupaten Garut, komunitas Nahdlatul Ulama, komunitas petani melalui himpunan, komunitas pedagang, komunitas lainnya. Namun anggotanya secara personal menunjukkan dukungan terhadap Suryana dan Wiwin Suwindaryati melalui tim relawan seperti laskar Aswaja.

Peran berbagai komunitas yang mendukung pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati mencalonkan diri menjadi pasangan calon jalur perseorangan pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018, baik secara terang-terangan maupun dukungan anggota komunitas secara perorangan, turut berkontribusi sebagai salah satu unsur membantu tim sukses dalam menjalankan strategi untuk mengumpulkan syarat minimum dukungan.

### 3.3. Relasi Antara Peran Modal Politik dengan Modal Sosial Pasangan Calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018

Upaya pasangan calon jalur perseorangan untuk memenuhi syarat minimum dukungan dalam pencalonan dapat disamakan dengan pertarungan modal dalam ranah kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu (1986) dimana dengan modal-modal yang dimilikinya pasangan calon bersaing dalam arena politik. Persaingan mendapatkan dukungan merupakan persaingan relasi modal-modal yang dimiliki pasangan calon selama pencalonan menjadi kepala daerah. Semakin banyak modal yang dimiliki semakin berpengaruh manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin banyak pasangan calon mengakumulasi modal-modalnya, semakin besar dukungan yang didapatkan. Peluang mendapatkan dukungan merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modal tertentu saja.

Dalam konteks penelitian ini, modal sosial pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati diperoleh karena adanya pemanfaatan modal politik pasangan calon tersebut. Berangkat dari pengalaman organisasi Suryana sebagai pengurus pesantren, anggota Ansor dan Sekretaris Tanfidz pada pengurus cabang NU Garut serta mantan ketua tim pemenangan Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra menjadikan Suryana senantiasa berinteraksi dan menjalin komunikasi politik yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat serta dapat mensosialisasi gagasan-gagasan program pencalonan apabila pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati terpilih menjadi kepala daerah di kabupaten Garut. Sementara itu, modal sosial diperoleh dari pemanfaatan modal politik Wiwin Suwindaryati selama menjadi politisi di partai Nasdem dan juga sebagai pengusaha yang senantiasa aktif mengikuti kegiatan sosial dan kemasyarakatan dengan berbagai kalangan masyarakat di kabupaten Garut menjadi penambah modal dalam berinteraksi dan menjalin komunikasi politik dengan masyarakat.

Selain itu, pengaruh peran modal politik berupa dukungan elit politik lokal tokoh keagamaan dan tim sukses yang solid yang terbentuk sejak pencalonan Aceng Holik M. Fikri dan Rd Diky Candra mempermudah Suryana dan Wiwin Suwindaryati memaksimalkan peran modal sosial dengan melahirkan interaksi sosial dan jaringan sosial yang memiliki kepercayaan melalui kedekatan fisik, sosial dan emosional antara mereka yang pada akhirnya masyarakat Garut bersedia memberikan dukungan pada tahapan pencalonan melalui jalur perseorangan pilkada kabupaten Garut tahun 2018.

#### 4. Simpulan

Pencalonan pasangan calon perseorangan dalam politik elektoral memperkuat demokrasi pasca reformasi. Namun penyelenggaraan pilkada selama ini menunjukkan dinamika politik yang berkembang dimana pencalonan pasangan calon jalur perseorangan selama kontestasi elektoral menunjukkan pola ke arah penurunan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kasus calon perseorangan sering kali menemukan kegagalan dan mengalami hambatan terkait persyaratan pencalonan karena regulasi terutama syarat minimum dukungan.

Proses pemenuhan syarat minimum dukungan bagi pasangan calon perseorangan dapat digambarkan sebagai arena politik yang didalamnya mengandung pertarungan akumulasi terhadap kepemilikan modal (*capital*) yang menyertainya selama kontestasi. Peran modal pasangan calon menjadi faktor penting dalam mengatasi kesulitan dalam mengumpulkan syarat minimum dukungan. Tersedianya modal politik (*politic capital*) dan modal sosial (*social capital*) diharapkan memperlancar proses pasangan calon untuk menyediakan dan memenuhi syarat minimum dukungan.

Peran modal politik dan modal sosial pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimum dukungan merupakan faktor penting pencalonan pasangan calon tersebut pada pilkada kabupaten Garut tahun 2018. Kepemilikan modal politik pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati berupa pengalaman organisasi keagamaan dan politisi, dukungan elit politik lokal yang merupakan tokoh agama dan tim sukses yang telah terbentuk lama dan solid menjadikan kekuatan pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimum dukungan. Selain itu penggunaan modal sosial berupa kepercayaan timbal balik pasangan calon dengan pendukungnya melahirkan interaksi sosial dan jaringan sosial yang pada akhirnya masyarakat Garut bersedia memberikan dukungan.

Peran modal politik dan modal sosial pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati diatas akan dapat bersaing dengan pasangan calon lainnya manakala kedua modal tersebut berakumulasi satu sama lainnya karena peluang mendapatkan dukungan merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu modal saja tetapi relasi modal politik dan modal sosial.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

#### 6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

## References

- Agusyanto, R. (2011). Dukungan Politik dan Jaringan Komunikasi Sosial: Kasus Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. *Journal Communication Spectrum* 1(1).
- Altika, N. (2012). Faktor Penentu Kemenangan OK Arya Zulkarnain di Kecamatan Limapuluh. *Jurnal Dinamika Politik*. 1(1).
- Anggraini, T. (2017). *Calon Perseorangan Cenderung Menurun*. Perludem.Org. <http://perludem.org/2017/11/30/calon-perseorangan-cenderung-menurun/>. Diakses tanggal 14 Februari 2021, pukul 14.00 wib.
- Booth, J. A., & Richard, P. B. (1998). Civil Society, Political Capital, and Democratization in Central America. *The Journal of Politics*, 60(3), 780–800. <https://doi.org/10.2307/2647648>
- Bourdieu, P. & Wacquant. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bourdieu, P. (1986). "The forms of capital". In J. Richardson (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood.
- Casey, K.L. (2008). *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*. Paper Presented at The Illinois State University Conference for Student of Political Science, University of Missouri-ST. Louis.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi Ketiga. Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta. Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Dewi, K. H. & Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E. & Soebhan, S. R. (2018). Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267-288. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.765>
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. New York, United States of America: Cambridge University Press.
- Harker, R., dkk. (ed.). (2009). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. (Pipit Maizier Pentj). Yogyakarta: Jalasutra.
- Hermawanti, M. (2002). *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat, Laporan Need Assessment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara Timur*. Jogjakarta: IRE Jogjakarta.
- KPU Kabupaten Garut. 2018. *Laporan pencalonan pada Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018*. Garut: KPU Kabupaten Garut.
- Mahpuddin, M. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 98-117. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7737>

Pantouw, S. M. I. 2012. *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Mazimiliaan Lomban pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)*. Tesis.

Perludem. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Program Kajian dan Publikasi didukung oleh IFES dengan pendanaan dari AUSAID.

Perludem. (2017). *Calon Perseorangan Cenderung Menurun*. <http://perludem.org/2017/11/30/calon-perseorangan-cenderung-menurun/>. Diakses tanggal 14 Februari 2021, pukul 14.30 wib.

Rumayya. (2016). *“District Head’s Political Party and Local Development: Observing The Results of Indonesia’s 2005-2013 Direct Local Elections”*. Paper Presented at Indonesia Study Group, ANU Indonesia Project. Australia: Australian National University.

Suaramerdekaindonesia.com. (2018). *Wiwin Suwindaryati, SH Bangkit Untuk Warga Garut*. <https://smi-news.com/wiwin-suwindaryati-sh-bangkit-untuk-warga-garut/>. Diakses tanggal 28 Juni 2021, pukul 08:06 WIB.

Sya’ban, A. A. G. (2020). *Menziarahi Makam KH. Zaenal Arif dan KH. Ahmad Adzrai Sukaraja Garut*. <https://sanadmedia.com/post/kh-zaenal-arif-dan-kh-ahmad-adzrai-sukaraja-garut>. Diakses tanggal 26 Juni 2021, pukul 21:31 WIB.

Tawakkal, G. T. I., Damayanti, R., Subekti, T., Garner, A. D., & Seitz, T. R. (2020). Jejaring Sosial Dalam Pembentukan Tim Sukses Mandiri Di Pemilu Dprd Kabupaten 2019. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(1), <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i2.25654>

Tomaito, S. 2011. *Strategi Politik Aristokrat di Pemilu*. Jogjakarta: PLOD-UGM.

Usman, S. 2018. *Modal Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajat (Anggota IKAPI).

## Tentang Penulis

**Achmad Andrian**, Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006, saat ini penulis sedang melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Penulis saat ini bekerja sebagai ASN di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**Sri Budi Eko Wardani**, Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.